

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan kualitas masyarakat tidak terlepas dari peranan elemen-elemen yang mempunyai korelasi terhadapnya. Di sisi lain banyak orang yang sebenarnya masih hidup dalam taraf jauh dari kelayakan atau kemiskinan. Kemiskinan hidup membuat mereka (masyarakat) tidak dapat atau kadang kala tidak pernah memikirkan masalah kelayakan. Orang seperti ini cukup banyak ditemui dan terbanyak dari mereka yang berada di pedesaan. Karena ketidakmampuan mereka umumnya tidak kuasa mengatasinya. Untuk itu perlu perlu adanya bantuan dan uluran tangan dari pihak luar, tapi bantuan dan uluran yang diberikan baru dapat berguna jika yang dibantu tahu bagaimana menggunakan bantuan tersebut. Usaha utama yang paling baik ditempuh adalah menyadarkan dan memberi tahu mereka, yang ditempuh dengan usaha pembangunan masyarakat dan pembangunan desa di mana mereka hidup.

Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, pemerintah telah melaksanakan serangkaian pembangunan nasional yang bersifat menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap, berencana serta berkesinambungan. Tujuan melaksanakan pembangunan nasional ini adalah sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam ketetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Pembangunan adalah cara untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa. Pembangunan ini merupakan proses yang tidak pernah berhenti, karena permasalahan selalu berkembang dan muncul sesuai dengan tingkat kemajuan pengetahuan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula tingkat kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. Artinya pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan semakin dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui peningkatan program-program pembangunan.

..... Dalam rangka merealisasikan tujuan pembangunan nasional tersebut, pemerintah selanjutnya menetapkan suatu kebijaksanaan pembangunan bahwa titik berat pembangunan perlu diarahkan kepada masyarakat pedesaan. Konsekuensi demikian disadari pemerintah, karena terdapat beberapa alasan antara lain:

“Pertama bahwa kurang dari 80 persen penduduk Indonesia berdiam dan bertempat tinggal di daerah pedesaan, kedua bahwa potensi Sumber Daya Alam sebagian besar terdapat di daerah pedesaan, ketiga dilihat dari sudut pertanian dan keamanan nasional basis dan keamanan di daerah pedesaan”¹

Desa Panggungharjo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Desa Panggungharjo terletak di Ibukota Kecamatan Sewon, adapun batas wilayah desa Panggungharjo, sebelah utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta, sebelah selatan bersatasan dengan Desa Timbulharjo, sebelah barat berbatasan dengan Desa Tirtomulyo, sedang untuk sebelah timur

berbatasan dengan Desa Bangunharjo. Demi kemudahan dalam menjalankan dan mengatur Pemerintahan Desa, wilayah Desa Panggungharjo dibagi menjadi 14 pedukuhan, dan setiap pedukuhan juga masih dibagi menjadi beberapa Rukun Tetangga (RT).

Berbicara masalah penduduk, Desa Panggungharjo merupakan salah satu aset pembangunan yang cukup potensial karena Desa Panggungharjo merupakan salah satu daerah yang berada di perbatasan antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul. Partisipasi aktif warga desa sangat mendukung bagi keberhasilan pembangunan yang ada pada suatu daerah. Akan tetapi penduduk juga dapat menjadi kendala bagi kelangsungan pembangunan desa apabila jumlah penduduknya terlalu banyak. Sebagian besar penduduk Desa Panggungharjo bermata pencaharian pada sektor swasta, petani penggarap dan pada sektor pertukangan.

Desa Panggungharjo yang sampai saat ini masih dipimpin oleh seorang figur yang sangat memperhatikan kepentingan warga desanya, karena Kepala desa yang saat ini menduduki jabatan tertinggi di tingkat desa adalah salah satu putra daerah Panggungharjo sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan beliau merasa memiliki Desa Panggungharjo karena Desa Panggungharjo adalah tempat dimana ia dilahirkan dan dibesarkan.

Keberhasilan pembangunan Desa Panggungharjo ini tidak lepas dari usaha yang gigih serta jasa baiknya dari sosok seorang pemimpin yang melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Dengan jiwa kepemimpinannya itu maka

rasa persatuan dan kesatuan yang sangat erat, serta masyarakat juga sangat menghargai hasil jerih payah Kepala Desa beserta para pamong-pamong desa yang didukung oleh seluruh masyarakat Desa Panggunharjo.

Oleh karena itu Kepala Desa mengajak seluruh warga untuk menjaga keutuhan desa dari gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Kepemimpinan Kepala Desa dapat berjalan dengan lancar dan baik selama 8 tahun pertama, kemudian pemilihan Kepala Desa berikutnya dengan mudah diraihnya berkat dukungan serta kepercayaan warga masyarakat terhadap Kepala Desa Panggunharjo, sehingga beliau diberi kepercayaan menjabat Kepala Desa periode ke-2.

Dari sosok kepemimpinan Kepala Desa inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Panggunharjo sebagai obyek penelitian dengan judul: **“ANALISIS TERHADAP PROSES PEMBANGUNAN FISIK DI DESA PANGGUNG HARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL PERIODE 2005”**.

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan Desa Panggunharjo yang sesuai dengan harapan bangsa dan negara, diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat dalam setiap pelaksanaan pembangunan desa. Untuk dapat menumbuhkan partisipasi ini sangat diperlukan seseorang yang mampu mempengaruhi serta menggerakannya. Seseorang itu harus mampu bersikap sebagai pengasuh yang mendorong, menuntun dan membimbing masyarakat. Seseorang itu adalah Kepala Desa, sebab Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan di tingkat

penuntun yang mampu menggerakkan dan membangkitkan semangat warga masyarakat desa. Keberhasilan Kepala Desa dalam melakukan pembangunan di Desa Panggungharjo tidak lepas dari dukungan dan partisipasi aktif warga masyarakat Desa Panggungharjo

Pada dasarnya pembangunan merupakan suatu proses perubahan untuk menuju kepada taraf hidup masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan taraf hidup masyarakat senantiasa didudukkan sebagai sasaran dan tujuan dari setiap proses pembangun yang sedang berlangsung. Oleh sebab itu menjadi suatu hal yang logis apabila keberhasilan pembangunan itu diukur dari proses pembangunan yang menghasilkan perubahan-perubahan yang membawa dampak kepada taraf hidup masyarakat yang lebih baik.

Pembangunan ini meliputi seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya atau lebih ringkasnya mencakup aspek materiil dan aspek spiritual. Untuk memperoleh salah satu aspek secara optimal tentu saja mengurangi atau menunda pemenuhan aspek yang lain, karena sumberdaya yang terbatas.

Adapun kegiatan pembangunan di Desa Panggungharjo pada tahun 2005 membawa hasil yang cukup pesat dan dapat dirasakan oleh warga masyarakat Desa Panggungharjo. Pembangunan yang ada di Desa Panggungharjo dapat dikategorikan menjadi 2 bagian yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non

Adapun pembangunan pada bidang fisik yang sudah berjalan selama tahun 2005 meliputi:

- a. Pembangunan prasarana perhubungan
- b. Pembangunan prasarana lingkungan hidup

Sedangkan pembangunan pada bidang non fisik selama tahun 2005 yang sudah terlaksana antara lain:

- a. Pembangunan dibidang keagamaan
- b. Ekonomi dan koperasi
- c. Kegiatan sosial
- d. Pendidikan dan ketrampilan
- e. Olah raga dan kesehatan

Pada tahun 2005 pembangunan fisik yang ada di desa Panggungharjo meliputi: pengerasan jalan, bangket jalan lingkar, rehab sarana umum, pembuatan talut, pembuatan gorong-gorong, bangket selokan, pembuatan pagar bumi, pembuatan saluran limbah, dan lain-lain.

Selain pembangunan fisik, di Desa Panggungharjo juga telah menyelesaikan program-program pembangunan non fisik. Pembangunan non fisik di Desa Panggungharjo juga mendapat perhatian yang sama seperti halnya pembangunan fisik. Sebagai contoh dalam pembangunan non fisik yang telah berjalan dan sudah dapat dirasakan oleh warga masyarakat Desa Panggungharjo antara lain: pembinaan TPA, peringatan hari besar Agama, pengajian rutin, PHBI, MTQ desa, pembinaan pemuda, pendataan PMKS, pelatihan kursus ketrampilan, dan lain-lain.

Pembangunan di Desa Panggungharjo dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik menelan biaya sebesar: Rp. 321.965.000 sedangkan pembangunan non fisik sebesar: Rp.545.597.000. Proses pembangunan di Desa Panggungharjo tidak lepas dari peranan semua pihak seperti perangkat desa dan kesadaran para warga Desa Panggungharjo. Proses pembangunan yang ada di Desa Panggungharjo sebagian besar berjalan secara gotong royong, dalam proses pelaksanaan pembangunan sumber dana diperoleh dari bantuan pemerintah desa, bantuan dari pemerintah daerah, serta dari kesadaran para warga masyarakat desa untuk membangun Desa Panggungharjo sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di depan, terlihat bahwa pelaksanaan pembangunan desa merupakan suatu unsur yang terpenting dalam mensukseskan program pembangunan nasional. Maka kiranya dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana proses pembangunan fisik di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul pada tahun 2005?”

C. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori atau kerangka dasar pemikiran dan landasan teori

adalah suatu uraian yang menjelaskan variabel-variabel seperti yang dimunculkan

dalam rumusan masalah. Sehingga dapat membantu kita di dalam menentukan arah dan tujuan dari penelitian dalam memilih konsep yang tepat.

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, kontak, definisi dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Teori mengandung tiga hal yaitu: Pertama, teori adalah serangkaian proposisi antar konsep yang saling berhubungan. Kedua, teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep. Ketiga, teori yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya. Selanjutnya akan dikaji, dibahas dan dianalisis mengenai permasalahan atau fenomena dengan kerangka pemikiran untuk menemukan cara pemecahannya.

Sesuai dengan judul di dalam penulisan skripsi ini, maka akan dijabarkan pengertian mengenai variabel-variabel yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu:

1. Pembangunan

A. Teori Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu perubahan menuju peningkatan kesejahteraan. Karena itu potensi alam harus digali, dikembangkan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seperti yang dijelaskan Sondang P.

Siagian tentang pengertian pembangunan, yaitu:

“Suatu usaha atau perubahan atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintahan, menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”.²

Sedangkan menurut I Nyoman Beratha yang dimaksud dengan pembangunan adalah sebagai berikut:

“Suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan pada norma-norma tertentu. Perubahan yang direncanakan inilah yang disebut pembangunan”.³

Pembangunan nasional suatu bangsa sebenarnya merupakan suatu usaha rekayasa dari bangsa itu sendiri, yaitu untuk mencapai kesejahteraan lahir batin yang bukan saja menjadi idam-idaman dari setiap bangsa yang bersangkutan melainkan merupakan cita-cita setiap manusia.

Beberapa hal di muka yang perlu mendapat perhatian dan penekanan dari pengertian dasar pembangunan antara lain:

- a. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang kontinue atau dengan istilah lain melalui tahapan-tahapan. Karena apabila mengabaikan proses pentahapan, kemungkinan akan dijumpai banyak kesulitan bahkan kegagalan-kegagalan di dalam pelaksanaannya.
- b. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan seperti peningkatan taraf hidup masyarakat, maka kegiatan awal dimulai dengan pengembangan usaha di bidang ekonomi tanpa melupakan usaha dan kegiatan pembangunan di bidang lain. Karena dengan kemajuan di bidang ekonomi akan menjadi landasan materiil yang diperlukan untuk mendukung pengembangan di bidang lain.
- c. Dalam rangka kegiatan pembangunan, melibatkan juga partisipasi dari seluruh rakyat. Jadi tidak hanya para pengambil kebijaksanaan tertinggi,

³ I Nyoman Beratha, *Dasar-Dasar Pembangunan Desa*, Jakarta: Cahya Indonesia, 1992, hal. 65

perencana, pemimpin, pelaksana operasional, yang berperan aktif tetapi juga para petani, nelayan, buruh, pedagang kecil dan lain-lain.

- d. Di samping itu dalam rangka pembangunan ini, institusi-institusi kemasyarakatan seperti gotong royong, pemufakatan, pemusyawaratan dan lain-lain yang hidup dalam masyarakat, perlu diperiksa dengan seksama untuk akhirnya nilai-nilai positif dari institusi dapat dikembangkan bagi pembangunan dan untuk kehidupan nasional pada umumnya. Dengan pemanfaatan institusi yang diharapkan masyarakat akan lebih bisa dan lebih mampu untuk menguasai kondisi hidupnya, lingkungan dan dirinya sendiri.⁴

Pembangunan di sini tidak hanya dilaksanakan di pemerintahan pusat saja, akan tetapi pembangunan tersebut lebih diarahkan kepada pemerintah daerah, baik pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kecamatan, lebih-lebih kepada pembangunan masyarakat desa. dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Lebih lanjut mengenai perhatian pemerintah yang cukup besar terhadap pembangunan di pedesaan, yang dijelaskan dalam GBHN tahun 1999-2004:

Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana, pembangunan sistem agrobisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi dan pemanfaatan sumber daya alam.

⁴ *Ibid.*, hal. 70.

produksi dan lain-lain Pembangunan fisik desa menurut Taliziduhu Ndraha dapat digolongkan dalam pengelompokan- pengelompokan sebagai berikut:

- a) Prasarana perhubungan, bisa disebutkan diantaranya adalah jalan dan jembatan yang akan menghubungkan antar daerah sekitar.
- b) Prasarana produksi, misalnya saluran air, listrik, bendungan dan sebagainya.
- c) Prasarana pemasaran yang termasuk disini adalah kios, toko, pasar, dan sebagainya.
- d) Prasarana sosial, misalnya adalah gedung sekolah, tempat ibadah, sarana olahraga dan lain-lain.

C. Proses Pembangunan

Adapun pengertian proses adalah suatu tahapan-tahapan dalam suatu peristiwa pembentukan, pelaksanaan atau berjalanya suatu kegiatan tertentu dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Proses atau mekanisme dalam pelaksanaan pembangunan yaitu melalui tahap-tahap mulai dari pencarian sumber dana, jenis pembangunan yang akan dijalankan sampai dengan pelaksanaan pembangunan. Suatu proses menunjukkan kepada kita akan adanya suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara berurutan atau mempunyai tata urutan tertentu untuk mencapai suatu tujuan.

D. Pembangunan Desa

Sebelum menguraikan mengenai pengertian tentang pembangunan

Sebelum menguraikan mengenai pengertian tentang pembangunan

pengertian tentang pembangunan. Secara umum pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya. Dapat pula dikatakan pembangunan merupakan suatu serangkaian usaha perubahan yang telah direncanakan sebelumnya.

Pengertian pembangunan menurut Sondang P. Siagian adalah suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan Pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembaharuan negara (*nation bulding*).⁶

Dengan demikian, maka pengelompokan jenis-jenis usaha pembangunan fisik desa menurut Taliziduhu Ndraha pengelompokan-pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut: Prasarana perhubungan, bisa disebutkan diantaranya adalah jalan dan jembatan yang akan menghubungkan antar daerah sekitar. Prasarana produksi, misalnya saluran air, listrik, bendungan dan sebagainya. Prasarana pemasaran yang termasuk disini adalah kios, toko, pasar, dan sebagainya. Prasarana sosial, misalnya adalah gedung sekolah, tempat ibadah, sarana olahraga dan lain-lain.

Sedangkan pengelompokan-pengelompokan jenis-jenis pembangunan non Fisik adalah: Peningkatan kualitas sumber daya manusia, misalnya pelatihan-pelatihan pertanian, pemberantasan buta huruf, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa berupa pelatihan pengembangan usaha rumah tangga dan sebagainya.

⁶ Sondang P. Siagian *op cit* hal 26

E. Sistem Pemerintahan Desa

1. Pemerintah Desa

Dari segi administrasi atau ketatanegaraan, pengertian desa menurut Drs Taliziduhu Ndraha adalah:

- a. Desa adalah satuan ketatanegaraan yang terdiri atas wilayah tertentu suatu satuan masyarakat, dan satu kesatuan pemerintah, yang berkedudukan langsung di bawah Camat.
- b. Desa yang berotonomi desa adalah desa yang masyarakatnya merupakan kesatuan masyarakat hukum adat tertentu.
- c. Desa administrasi adalah desa yang tidak memiliki otonomi desa.⁷

Pengertian Desa juga dapat dipandang dari segi geografi, seperti yang dikemukakan oleh Prof. Drs. Bintarto, yaitu:

“Sebenarnya Desa itu adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu adalah wujud atau penempatan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungan dengan daerah-daerah lain.⁸”

Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia tulisan dari Prof. Drs. Wjowasito dan WJS Poerwadarminto, yang dimaksud dengan Desa adalah:

1. Sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan kampung (*di luar kota*) atau biasa disebut dengan kata lain dusun.

⁷ Taliziduhu Ndraha, *Metode Penelitian Pembangunan Desa*, Bina Aksara, Jakarta, 1982. hal. 14.

⁸ Wjowasito dan WJS Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jember, 1980. hal. 11.

2. Dusun atau udik (*dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan dari kata kota*)
3. Keterangan tempat, tanah dan daerah."

Demikian pula karena sifat keaneragaman masyarakat dan bangsa Indonesia menurut kenyataannya terdapat bermacam-macam sebutan untuk pengertian yang sama di masing-masing wilayah Indonesia. Sesuai dengan persyaratan yang dikenal dalam Ilmu kemasyarakatan dan Hukum Adat dapat ditemukan bermacam-macam peristilahan untuk pengertian desa.⁹

Apabila dikaji lebih mendalam sebenarnya desa memiliki pengertian yang bermacam-macam tergantung dari sudut mana kita memahaminya. Mengingat obyek dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada pemerintahan desa, maka akan diuraikan pengertian desa dari sudut Pandang Ilmu Pemerintahan. Dalam bukunya "*Desa*", Soetardjo Kartodikoesoemo, menyatakan bahwa yang dimaksud desa ialah suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.¹⁰

Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa, disebutkan bahwa Desa terdiri atas:

- a. Kepala Desa
- b. Badan Perwakilan Desa

Jadi Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa masing-masing merupakan unsur pemerintah desa. Kata unsur menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut ada

⁹ Wojowasito dan WJS. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, bagian I, Tjetakan IV, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1966, hal. 202.

¹⁰ Soetardjo Kartodikoesoemo, *Desa, Bantuk Simpa Bandung*, Yogyakarta, 1966

2. Dusun atau udik (*dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan dari kata kota*)
3. Keterangan tempat, tanah dan daerah.

Demikian pula karena sifat keaneragaman masyarakat dan bangsa Indonesia menurut kenyataanya terdapat bermacam-macam sebutan untuk pengertian yang sama di masing-masing wilayah Indonesia. Sesuai dengan persyaratan yang dikenal dalam Ilmu kemasyarakatan dan Hukum Adat dapat ditemukan bermacam-macam peristilahan untuk pengertian desa.⁹

Apabila dikaji lebih mendalam sebenarnya desa memiliki pengertian yang bermacam-macam tergantung dari sudut mana kita memahaminya. Mengingat obyek dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada pemerintahan desa, maka akan diuraikan pengertian desa dari sudut Pandang Ilmu Pemerintahan. Dalam bukunya "*Desa*", Soetardjo Kartodikoesoemo, menyatakan bahwa yang dimaksud desa ialah suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.¹⁰

Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa, disebutkan bahwa Desa terdiri atas:

- a. Kepala Desa
- b. Badan Perwakilan Desa

Jadi Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa masing-masing merupakan unsur pemerintah desa. Kata unsur menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut ada

⁹ Wojowasito dan WJS. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, bagian I, Tjetakan IV, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1966, hal. 202.

hubungan yang sangat erat. Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pada kepemimpinan pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan sekaligus sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan, kemsyarakatan, dan urusan pembinaan ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Di samping Kepala Desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat dalam arti menumbuhkan dan mengembangkan semangat membangun yang dijawai dengan azas usaha bersama dan kekeluargaan.

2. Otonomi Desa

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonoesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keaneragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam

... .. membuat kebijakan daerah

untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraanya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai maka pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, pengawasan dan perencanaan. Di samping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Bersamaan dengan itu pemerintah wajib memberikan fasilitasi yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan

Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa adalah:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah Propinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- d. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

3. Sistem Pemerintahan Desa

Di dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 ditekankan perlunya persyaratan tertentu bagi calon Kepala Desa. Diantaranya adalah berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpengetahuan sederajat. Dengan persyaratan tersebut Kepala Desa diharapkan mampu menangani urusan baik dalam urusan rumah tangga desa maupun urusan pemerintahn termasuk pembinaan ketrampilan dan ketertiban.

Mengenai pemeritahan Desa, dalam Pasal 104 dari Undang-Undang No.22 tahun 1999 yang menyebutkan Desa terdiri atas:

1. Kepala Desa
2. Badan Perwakilan Desa

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat dikatakan bahwa yang menyelenggarakan pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. Kepala Desa merupakan sentral dari pelaksanaan pemerintahan Desa, sedangkan Badan Perwakilan Desa merupakan lembaga

yang berfungsi untuk permsyawaratan atau pemufakatan untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Badan Perwakilan Desa merupakan peningkatan dari lembaga konsultasi Kepala Desa. Badan Perwakilan Desa adalah lembaga Permusyawaratan dan Pemufakatan, hal ini diatur dalam Pasal 104 dari Undang-Undang No.22 tahun 1999 yaitu sebagai berikut:

Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adapt istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Sementara itu di dalam penjelasan umum dari Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dijelaskan bahwa:

Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga legislative dan pengawasan dalam hal pelaksanaan pemerintahan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Sesuai dengan penjelasan di atas, Badan Perwakilan Desa dibentuk dengan tujuan memperkuat Pemerintahan Desa serta mewadahi dan sebagai perwujudan keikutsertaan dalam pemerintah Desa.

Dalam Pasal 101 dari Undang-Undang No.22 Tahun 1999, Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban yaitu:

1. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa:

Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan subsistem dan system penyelenggaraan Pemerintah sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa

bertanggung jawab pada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati:

2. Membina kehidupan masyarakat Desa.

Di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa. Lembaga dimaksud merupakan mitra pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa bertanggung jawab terhadap lembaga kemasyarakatan yang ada.

3. Membina perekonomian Desa;

Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan Desa, bantuan pemerintah pusat dan pemerintah Daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman Desa.

4. Memelihara Ketentraman masyarakat Desa;

Kepala Desa mempunyai kemampuan untuk melakukan pengawasan terhadap Desanya bersama-sama aparat keamanan, Hansip, Satpam yang lebih ditekankan pada pengawasan respresif untuk lebih memberikan kebebasan aerta rasa aman kepada masyarakat.

5. Mendamaikan Perselisihan Masyarakat di Desa;

Untuk mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa, Kepala Desa dapat dibantu oleh Perangkat Desa, serta Lembaga Hukum setempat. Sehingga perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

6. Mewakili Desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dituntut dan menuntut di Pengadilan. Untuk itu, Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Agar tugas dan tanggung jawab Kepala Desa dapat berjalan dengan efektif maka di dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa, harus terjalin hubungan antara Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa serta warga masyarakat di dalam pengambilan kebijakan di Pemerintahan Desa.

E. Definisi Konsepsional

Yang dimaksud dengan definisi konsepsional adalah bahwa dalam tahap ini penulis berusaha untuk dapat menjelaskan mengenai pembatasan pengertian suatu konsep dengan konsep yang lainnya yang merupakan suatu abstraksi dari hal-hal yang diamati agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dengan demikian definisi konsepsional adalah definisi yang menggambarkan suatu abstraksi dari hal-hal

Berdasarkan atas kerangka dasar teori yang telah diuraikan di muka, akan diuraikan beberapa konsep yang berhubungan dengan penelitian yaitu:

1. Pembangunan

Suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan pada norma-norma tertentu. Perubahan yang direncanakan inilah yang disebut pembangunan

2. Pembangunan Fisik

Adalah pembangunan yang dikhususkan pada keadaan suatu fisik suatu tempat, yang terdiri atas: prasarana perhubungan, sarana social, sarana produksi dan lain-lain.

3. Proses pembangunan

Adalah rangkaian pelaksanaan pembangunan yang terdiri dari rencana usulan pembangunan sampai dengan pelaksanaan pembangunan.

4. Desa

Desa itu adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu adalah wujud atau penempatan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungan dengan daerah-daerah lain.

5. Pemerintah Desa

Dalam pemerintah desa dibentuk Pemerintahan desa dan Badan Perwakilan Desa yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan desa yang dapat mendukung kemajemukan masyarakat desa

6. Pembangunan Desa

Adalah suatu usaha pembangunan dari masyarakat pada unit Pemerintah terendah yang harus dilaksanakan dibina dan terarah sebagai bagian penting dalam usaha Pembangunan nasional

F. Definisi Operasional

Menurut Sofian Efendi, definisi operasional merupakan unsur penelitian yang memberi tahu bagaimana caranya mengukur suatu variabel.¹¹

Pembangunan fisik desa meliputi:

a. Pembangunan prasarana perhubungan

Adalah pembangunan yang difokuskan sektor sarana perhubungan, diantaranya adalah jalan dan jembatan yang akan menghubungkan antar daerah sekitar.

b. Pembangunan prasarana sosial

Adalah pembangunan fisik yang sasarannya pada tempat-tempat sosial, misalnya adalah gedung sekolah, tempat ibadah, sarana olahraga dan fasilitas-fasilitas umum lainnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian lapangan (*Field Research*)

penelitian ini adalah faktor-faktor sosial yang masih mempunyai dimensi yang beragam jumlahnya, maka pertimbangan mengenai jenis penelitian harus sedapat mungkin disesuaikan dengan kondisi dari obyek penelitian yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut maka metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah metode diskripsi kualitatif, yaitu penelitian dengan cara menerangkan, menjelaskan serta menggambarkan serangkaian peristiwa atau fenomena yang berkenaan dengan masalah dan unit-unit penelitian lapangan secara jelas.¹² Dari hasil data-data yang diperoleh akan dianalisis.

2. Lokasi dan Obyek Penelitian

a. Lokasi penelitian di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, dengan memperhatikan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- Karena Desa Panggungharjo merupakan pusat pembangunan Kecamatan Sewon sehingga masalah-masalah yang muncul lebih kompleks jika dibandingkan dengan desa lain. Dilihat dari sisi sosial budaya maupun ekonomi dapat dikategorikan dalam suatu wilayah sub urban.
- Dilihat dari tujuan penelitian, yaitu mempunyai keinginan untuk mengetahui secara jelas bagaimana keadaan pemerintahan Desa Panggungharjo.
- Dimungkinkan adanya kemudahan di dalam mendapatkan sumber data, karena penyusun sendiri termasuk warga desa setempat, sehingga

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka

diharapkan akan dapat membantu pemecahan fenomena yang ada pada masyarakat Desa Panggungharjo.

- Penyusun skripsi akan membantu pihak-pihak yang bersangkutan yang ada di Desa Panggungharjo mengenai fenomena-fenomena yang sedang dialami.

b. Obyek Penelitian:

Pembangunan yang ada di Desa Panggungharjo yang meliputi aspek materiil maupun spiritual yang sudah berjalan selama tahun 2005 di wilayah Desa Panggungharjo yang terdiri dari 14 Pedukuhan. Sebagai focus obyek penelitian dititikberatkan pada pembangunan fisik tahun 2005.

2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses pembangunan di Desa Panggungharjo.
- b. Untuk mengetahui hasil pembangunan yang telah berjalan di Desa Panggungharjo pada tahun 2005.

2) Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian dapat memberikan pertimbangan di dalam pemecahan masalah yang dihadapi dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijaksanaan yang telah dilakukan serta sebagai masukan (*input*) bagi peningkatan kinerja pemerintah Desa Panggungharjo terhadap

- b. Memberikan sumbangsih terhadap pemerintahan Desa Panggungharjo untuk pemikiran lebih lanjut.

3. Data dan Sumber Data

Karena metode penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analisis, maka sangat dibutuhkan data-data penelitian yang bersifat primer dan sekunder.

Dalam hal ini Winarno Surachmad menjelaskan mengenai data primer dan sekunder, sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data lengkap dan diperoleh dari sumber data langsung oleh penyelidik.
- b. Data Sekunder adalah data yang terpilih, dahulu dikumpulkan dari orang luar penyelidikan.¹³

Dari pendapat di muka dapat disimpulkan mengenai pengertian data primer dan sekunder sebagai berikut:

- a. Data primer

Adalah data yang diperoleh dari hasil lapangan melalui wawancara dan observasi dengan Kepala Desa, Perangkat Desa dan masyarakat Desa Panggungharjo yang berkaitan dengan obyek penelitian.

- b. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh atau dipelajari dengan mempelajari catatan, laporan dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian seperti buku-buku di perpustakaan.

¹³ Winarno Surachmad, *Dasar-dasar Teknik Pengumpulan Tesis*, Bandung, 1978

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Koentjoroningrat mengemukakan bahwa “Metode *interview* mencakup cara yang digunakan seseorang untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari seseorang responden dengan bercakap-cakap dengan nara sumber”.¹⁴ Wawancara di pergunakan untuk menggali data langsung dari nara sumber secara lisan tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan penulisan. Tahap ini dilakukan melalui dialog langsung antara penulis dengan nara sumber yang telah ditentukan dengan maksud untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai objek yang diteliti. Wawancara dilakukan dimulai tanggal 1 Mei 2005, wawancara dilakukan kepada: Kepala desa, Sekretaris Desa, Kabag. Pembangunan serta para Tokoh masyarakat di Desa Panggunharjo.

b. Kepustakaan

Data yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen majalah, kliping yang ada hubungannya dengan skripsi yang di peroleh dari perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta dari Perpustakaan daerah Kabupaten Bantul.

c. Observasi

Obsevasi ini dilakukan secara langsung yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung terhadap gejala-gejala obyek yang

¹⁴ Koentjoroningrat, *Demografi Metode dan Teknik*, Tahun 1971

diteliti baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi yang sebenarnya, maupun dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan.¹⁵

5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan maka penyusun menggunakan analisis data kualitatif. Data-data yang terkumpul, yang berkaitan dengan tujuan penelitian akan diinterpretasikan sesuai dengan arti data yang disesuaikan dengan tujuan dan kepentingan-kepentingan penelitian.

Mengenai penelitian yang bersifat deskriptif Winarno Surachmad, menjelaskan sebagai berikut: sifat dari bentuk penelitian deskriptif ini adalah menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami oleh suatu hubungan kegiatan, pandangan sikap yang nampak atau tentang proses yang sedang berkerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang sedang menampak, dan sebagainya.

¹⁵ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Metode dan Teknik*, Bandung, Tarsito, 1982,